

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon: (0370) 7856244, Faksimile: 625341 Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Email: kanwilntb@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Senin, 26 Februari 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Momon Soerherman, S.H.

Jabatan

: Kepala Bagian Hukum

Instansi

: Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama

: Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.

Jabatan

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Instansi

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

selanjutnya sebagai Perwakilan Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

- Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 180/17/Kum tanggal 5 Januri 2024; 188/05/Kum tanggal 10 Januari 2024; 188/31/Kum tanggal 29 Januari 2024; 188/32/Kum tanggal 29 Januari 2024; 188/33/Kum tanggal 29 Januari 2024; perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi mengenai:
 - A. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Vegara;
 - C. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 - D. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Vendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- E. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- F. Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2024 :

pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu/Perwakilan Pemrakarsa;

- Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
- Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

SEMERIA

Pemrakarsa,

Morrion Soerherman, S.H.

Mataram, 26 Februari 2024

a.n.Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmorisasian.

Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Parlindungan NIP 197007011992031002